



**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
SAMARINDA:
PROBLEMATISASI KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN WPR**

**ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN SAMARINDA
MUNICIPALITY:
POLICY PROBLEMATIZATIONS USES WPR APPROACH**

Andi Wahyudi

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi
Negara (PKP2A III LAN)
Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) Samarinda 75124, Kalimantan Timur
Email: awahyudi2@yahoo.co.id

Naskah diterima: 28 November 2015, revisi: 3 Maret 2016.

Abstract

This study emphasizes on document critical analysis on waste management policy in Samarinda Municipality, namely Municipality Regulation # 2 / 2011. Drawing on Bacchi's WPR (What is the problem represented to be?) approach to policy analysis, this study reveals that management and citizen obedience are presented as two main issues in the policy to improve the quality of public and environmental health. On the management issue, the waste management policy is not effective to tackle the problem. It is because of poor capacity in transporting the waste, while the volume of waste production is higher than the transported one. Consequently, the uncollected waste in the city prevents the local government's effort to create a clean and healthy environment. Then on the obedience issue, this policy sets sanctions for anyone who breaks the regulation. Unfortunately, this policy does not set public education as an important issue to improve citizens' behaviour. Public education should be a bottom-up approach to support the effort to create a clean and healthy city.

Keywords: *policy analysis, waste management, problematizations, WPR approach.*

Abstrak

Kajian ini melakukan analisis kritis terhadap dokumen kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, yaitu Perda No. 2 / 2011. Dengan menggunakan pendekatan WPR (*What is the problem represented to be?*) yang diperkenalkan oleh Bacchi, kajian ini mengungkapkan bahwa persoalan manajemen dan kepatuhan warga menjadi isu utama yang ditampilkan dalam kebijakan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dari sisi manajemen, kebijakan pengelolaan



sampah di Kota Samarinda tidak berjalan efektif untuk menjawab persoalan. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya kapasitas pengangkutan sampah dibandingkan dengan volume produksi sampah sehingga sebagian sampah tidak terangkut. Sisa sampah ini menjadikan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tidak terwujud. Kemudian dari sisi kepatuhan, kebijakan ini mengatur sanksi terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Namun, kebijakan ini tidak menyentuh edukasi publik sebagai isu penting untuk mengubah perilaku masyarakat. Edukasi publik seharusnya bisa dijadikan sebagai pendekatan *bottom-up* untuk mendukung upaya pemerintah kota menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kata kunci: analisis kebijakan, pengelolaan sampah, problematisasi, pendekatan WPR.

A. PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan sampah telah menjadi permasalahan serius di Kota Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2011 tentang Pengelolaan Sampah, namun hal ini belum mampu menyelesaikan persoalan sampah di kota ini. Sebelum Perda No. 2/2011 tersebut diterbitkan, upaya penanganan persoalan sampah sebenarnya juga telah dilakukan berdasarkan beberapa Perda untuk memberikan dasar legalitas yang kuat. Pada 1987, Pemkot Samarinda menerbitkan Perda No. 5/1987. Kemudian pada tahun 2002 diterbitkan Perda No. 19/2002 untuk mengganti Perda sebelumnya. Kebijakan-kebijakan itu mengatur persoalan yang sama dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat.

Tetapi pada kenyataannya pengelolaan sampah di kota ini masih menyisakan permasalahan. Produksi sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun sementara peningkatan kemampuan pengangkutan sampah masih terbatas dan bahkan tertinggal dibandingkan pertumbuhan produksi sampah (lihat Grafik 1). Bahkan pernah dilaporkan bahwa sebanyak 300 ton sampah tidak terangkut per hari di kota ini (*Kaltimpost*, 23 April 2013).

Kota Samarinda memiliki wilayah seluas 718 km² dengan populasi tahun 2014 sebesar 830.676 jiwa, sehingga kepadatan penduduk di kota ini adalah 1.157 jiwa/km². Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun memiliki korelasi dengan peningkatan produksi sampah yang dihasilkan terutama dari sektor rumah tangga. Grafik 1 menunjukkan tren produksi sampah di kota ini mulai tahun 2005 hingga 2014 yang memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun, kecuali tahun 2013. Perbandingan Grafik 1 dan Grafik 2 menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan volume sampah paralel dengan peningkatan jumlah penduduk yang juga meningkat setiap tahun.

Sektor rumah tangga menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari dan peningkatan jumlah penduduk juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi sampah rumah tangga. Di sisi lain, kemampuan pemerintah kota untuk mengangkut sampah tidak mencukupi dengan volume sampah yang dihasilkan warga. Fakta tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap persoalan kesehatan warga, tetapi juga secara lebih luas menimbulkan permasalahan keindahan kota (estetika), kesehatan lingkungan dan mengancam terwujudnya visi kota Samarinda. Hal ini seharusnya mendorong pemerintah kota untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang sudah ada.

Kebijakan pengelolaan sampah ini memberikan mandat kepada pemerintah kota untuk menyusun peraturan-peraturan turunan yang memungkinkan kebijakan pengelolaan sampah bisa diimplementasikan dengan baik. Seperti Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 dan Pasal 25 yang masing-masing mengamanatkan disusun Peraturan Walikota dalam hal pengurangan sampah, pengelolaan

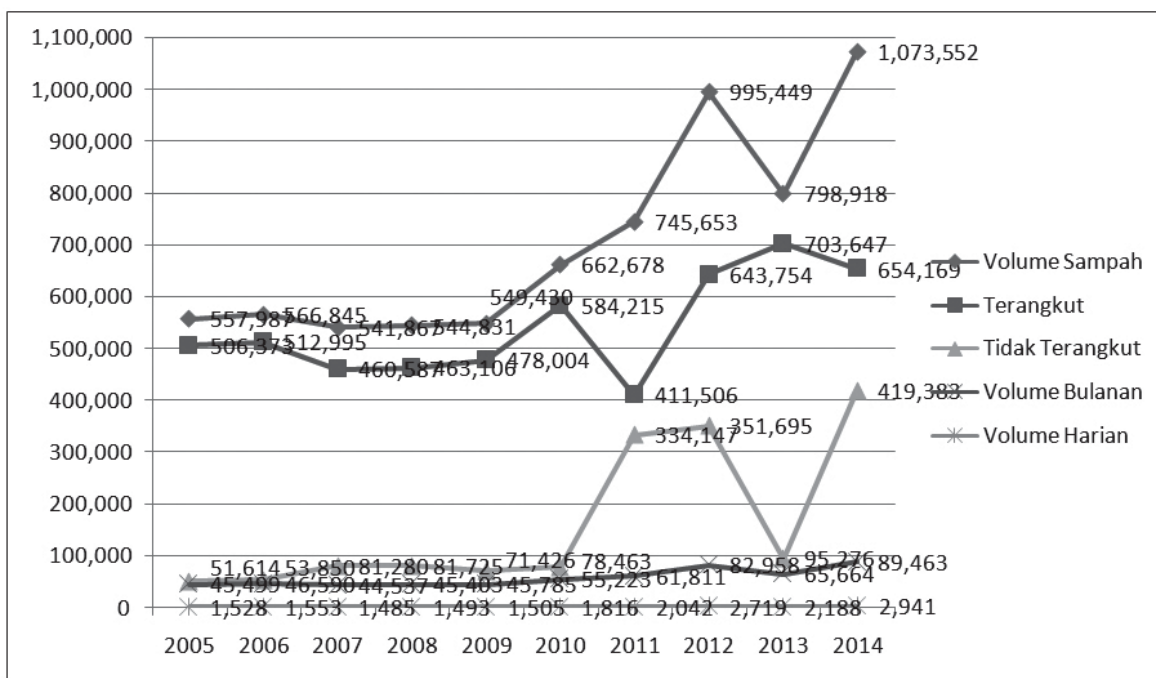


sampah, petunjuk sistem darurat, dan penyediaan tempat pembuangan sampah sementara. Selanjutnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menjadi instansi yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DKP mengoperasikan truk angkutan sampah dan merekrut para pekerja kebersihan.

Walaupun kebijakan ini telah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi pada kenyataannya permasalahan sampah masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Pada 2010, instansi ini tercatat mengoperasikan 31 unit truk (*dump truck*) untuk angkutan sampah. Kemudian pada 2011 mengalami penurunan yaitu hanya mengoperasikan 25 unit truk dan mengakibatkan menurunnya kemampuan pengumpulan sampah sehingga sampah yang tidak terkumpul menjadi meningkat sebanyak 334.147 ton. Selanjutnya, pada 2012 dan 2013 jumlah truk pengangkut sampah meningkat menjadi masing-masing 36 unit dan 52 unit (BPS, 2014 : 108). Walaupun secara umum ada peningkatan jumlah armada pengangkut sampah dari 2010 hingga 2013, tetapi masih terjadi kesenjangan antara volume sampah yang diproduksi dengan jumlah sampah yang berhasil diangkut. Bahkan setelah 2011 ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, masih banyak jumlah sampah yang tidak terangkut.

Kemudian pada 2014 jumlah truk pengangkut sampah (*dump truck*) justru mengalami penurunan menjadi 47 unit (BPS, 2015: 108). Padahal pada tahun tersebut jumlah produksi sampah meningkat cukup drastis dari 798.918 ton menjadi 1.073.552 ton. Akibatnya, kemampuan pengangkutan sampah menurun menjadi 654.169 ton dan jumlah sampah yang tidak terangkut meningkat menjadi 419.383 ton di tahun tersebut (lihat grafik 1). Kenyataan ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah kota dan para pemangku kepentingan.

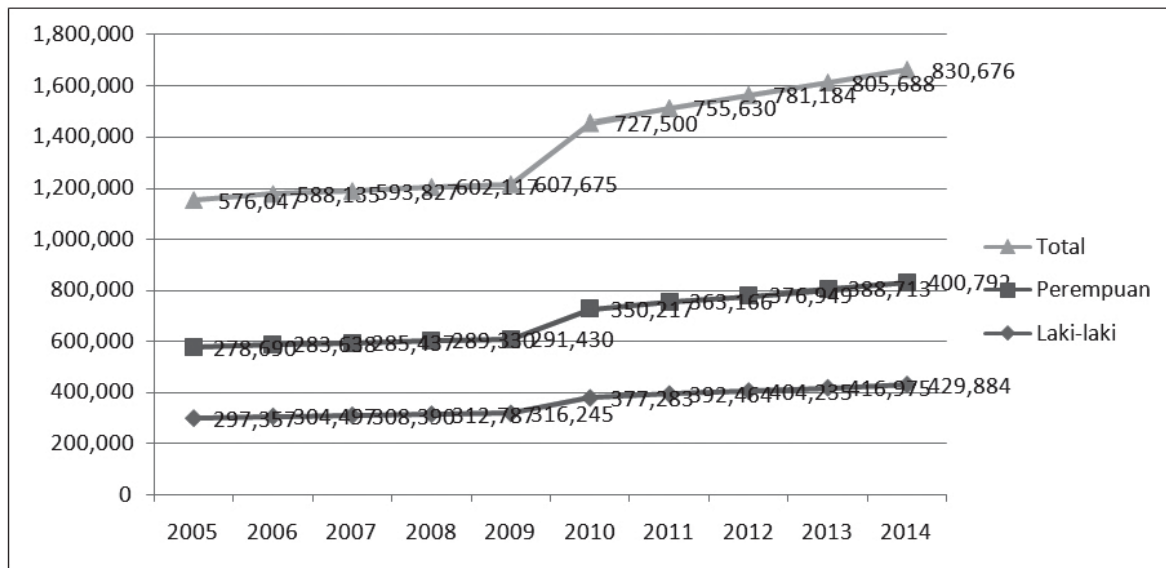
Grafik 1.
Produksi Sampah di Kota Samarinda, 2005-2014 (dalam ton)



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (dalam BPS, 2010: 106; 2014: 107; 2015: 107).



Grafik 2.
Perkembangan Populasi di Kota Samarinda 2005 - 2014



Source: BPS (2010: 36; 2014: 35; 2015: 36).

Beberapa fakta tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan apakah kebijakan pengelolaan sampah yang telah dibuat benar-benar mengarah kepada pemecahan persoalan. Oleh karena itu menjadi penting untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan sampah di kota ini untuk menemukan permasalahan yang ada dalam kebijakan serta permasalahan yang ingin dipecahkan melalui kebijakan tersebut.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa pengelolaan sampah di kota ini menjadi persoalan serius untuk segera diselesaikan. Pertama, dari aspek kebijakan, ratusan ton sampah yang tersisa setiap hari karena tidak bisa diangkut oleh unit pelayanan kebersihan membuktikan bahwa kebijakan pengelolaan yang telah dibuat sejak 2011 di kota ini tidak berjalan dengan baik. Kemungkinan permasalahan bisa terjadi pada proses perumusan kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak atau kurang menyentuh permasalahan yang sebenarnya, atau bisa juga permasalahan terjadi pada implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi yang komprehensif untuk mencari akar persoalan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini.

Kedua, dari aspek manfaat yang dirasakan masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah yang baik beserta implementasinya akan mendukung upaya penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat dimana masyarakat bisa tinggal secara nyaman. Kebijakan yang bisa menciptakan lingkungan seperti itu berarti bisa menciptakan nilai kepada masyarakat (*public value*), yaitu sesuatu yang bisa menambah nilai terhadap lingkungan publik dan juga warganya (Benington, 2011: 43). Sebagaimana dikemukakan oleh Moore (1995: 40) bahwa nilai publik muncul ketika warga masyarakat merasa lebih baik untuk tinggal di kota yang bersih sebagai hasil dari kebijakan pemerintahnya, daripada tinggal di lingkungan yang kotor.

Dan ketiga, Kota Samarinda memiliki visi menjadi kota metropolitan yang berbasis industri, perdagangan dan pelayanan, hijau dan berwawasan lingkungan, dan juga memiliki keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraan publik (Pemkot Samarinda, nd). Ini merupakan visi besar dan ambisius yang memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkannya. Lingkungan bersih dan sehat akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi tersebut. Selain itu, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, kota ini bisa disebut sebagai beranda



depan provinsi ini karena merupakan pusat pemerintahan dan kantor berbagai instansi pemerintah provinsi serta instansi vertikal berada di kota ini. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di kota ini menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan visi kota.

Lebih dari itu, pengelolaan sampah juga telah menjadi perhatian nasional sehingga pemerintah menerbitkan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Artikel ini menganalisis dokumen kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda dengan menggunakan pendekatan WPR (*What is the problem represented to be?*) yang diperkenalkan oleh Bacchi. Dalam disiplin kebijakan publik, ada bermacam pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah kebijakan. Coveney (2010) misalnya membandingkan tiga pendekatan yaitu pendekatan WPR, *governmentality*, dan *policy cycle*. Pendekatan WPR menekankan pada analisis representasi masalah yang dimunculkan dalam kebijakan, sedangkan *governmentality* digunakan untuk menguji cara kebijakan dan strategi kebijakan diimplementasikan. Selanjutnya, *policy cycle* menekankan pada proses penyusunan kebijakan.

Penggunaan pendekatan WPR untuk analisis kebijakan pengelolaan sampah ini dilakukan karena kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda sudah ada dan diimplementasikan sejak 2011 tetapi masih menyisakan persoalan di lapangan. Beberapa penulis telah menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis isu kebijakan yang beragam, seperti Murray dan Powel (2009), Payne (2014), Barsoum (2015), serta Bacchi (2015) sendiri. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat isu utama atau permasalahan yang ditampilkan dan ingin dipecahkan dalam suatu kebijakan serta alasan yang mendasarinya. Karena dari formulasi permasalahan kebijakan akan berimplikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan nantinya apakah bisa menjangkau atau menjawab permasalahan yang ada.

Struktur tulisan ini disajikan dalam lima bagian. Pertama, tinjauan pustaka yang menyajikan pengelolaan sampah di beberapa kota sebagai bahan perbandingan. Kedua, metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Ketiga, kerangka teori menguraikan tentang WPR sebagai sebuah pendekatan untuk menganalisis kebijakan. Keempat, hasil dan pembahasan menyajikan problematisasi isu kebijakan. Dan terakhir adalah penutup yang meliputi kesimpulan, rekomendasi, serta implikasi kebijakan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan literatur ini dipaparkan berbagai praktek pengelolaan sampah di berbagai kota atau negara baik dari aspek keberhasilan maupun kegagalan sehingga bisa diperoleh pelajaran dari berbagai praktek itu. Studi mengenai pengelolaan sampah telah dilakukan oleh banyak ilmuwan dari berbagai negara dengan menggunakan istilah yang berbeda, seperti *waste management* dan *solid waste management*. Dalam pengelolaan sampah, pendekatan umum yang sering digunakan oleh unit otoritas pengelola sampah untuk menangani persoalan produksi sampah yang melimpah adalah konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Kemudian beberapa pendekatan baru juga dikenalkan, yaitu 4R yang merupakan modifikasi 3R dengan menambahkan unsur '*recover*' dan juga pendekatan 5R yaitu konsep 3R dengan menambahkan unsur '*respect dan rethink*'. Berbagai pendekatan itu pada intinya adalah meminimalkan produksi sampah baik dari sektor rumah tangga maupun industri melalui pola pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (Pariatamby & Fauziah, 2014: 15-16).

Pengelolaan sampah dengan variasi penekanan yang berbeda dilakukan di berbagai kota dan beberapa cara telah diadopsi. Di Bangladesh, strategi 3R telah diratifikasi pada tahun 2010. Ini



diharapkan bisa meminimalkan produksi sampah yang dampaknya bisa diharapkan menjelang 2015 dan mempromosikan daur ulang (*recycling*) sampah melalui pemisahan sampah dan memberikan insentif untuk aktivitas daur ulang sampah tersebut (Yousuf, 2014 : 63). Sejauh ini, daur ulang sampah di negara tersebut dilakukan secara individu dengan melibatkan pemungut sampah serta industri kecil dan menengah. Aktivitas ini tidak terkontrol oleh otoritas resmi dan selanjutnya aktivitas daur ulang ini menjadi aktivitas bisnis yang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat (Yousuf, 2014: 64). Implementasi strategi 3R di Dhaka dan Chittagong sebagai proyek percontohan yang melibatkan warga masyarakat dan para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk menciptakan kepedulian masyarakat. Yousuf (2014: 74) menyatakan bahwa peningkatan kepedulian, pembangunan kapasitas, dan prioritas politik menjadi penting untuk menjadikan rencana ini bisa berjalan.

Sementara itu di Taipei, ibukota Taiwan, pemerintah setempat mencanangkan Program Pengurangan Sampah (*Garbage Reduction Program / GRP*) dan menerapkannya di daerah Nei-fu sebagai proyek percontohan pada tahun 1993. Latar belakang dan teori program GRP ini adalah sebagai berikut:

Pertama, warga menempatkan sampah di titik-titik atau tempat tertentu yang dekat dengan rumah mereka. Kedua, petugas berperan mengumpulkan sampah setiap hari, kecuali hari Selasa. Ketiga, pemerintah setempat mengirim surat kepada warga untuk mensosialisasikan program ini dan juga membuat berbagai baner dan kampanye di media mengenai program ini (Chen *et al*, 1997). Program ini telah diimplementasikan secara baik, tetapi tidak memberikan dampak terhadap pengurangan volume sampah. Menurut Chen *et al* (1997), kegagalan pengurangan sampah ini karena bagian dari program teori tidak bekerja seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, menurut Chen *et al* (1997), dalam upaya untuk mengurangi volume sampah maka pemerintah kota perlu melakukan pendidikan publik dan menerapkan sistem pembayaran berdasarkan besaran sampah yang dihasilkan warga.

Sistem pembayaran sebagai upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga sudah diterapkan di Melbourne, Australia. Pemerintah lokal mengenakan biaya berdasarkan volume sampah (*volume-based marginal pricing*). Tetapi hal ini tidak meningkatkan respon yang berarti dari warga. Di sisi lain, warga mengurangi produksi sampah untuk alasan non ekonomi dan menerima pembatasan kapasitas sampah yang ditentukan pemerintah setempat (Pickin, 2008). Dengan demikian partisipasi warga menjadi faktor penting sebagai upaya pengurangan produksi sampah rumah tangga dalam sistem pengelolaan sampah di suatu daerah atau kota.

Untuk konteks Indonesia, Meidiana dan Gamse (2011) membandingkan pengelolaan sampah di tigakota, yaitu Surabaya, Malang dan Yogyakarta. Di Malang dan Yogyakarta telah memiliki regulasi sebelum UU No. 18/2008 tentang pengelolaan sampah diterbitkan. Tetapi karena penegakan hukum yang lemah maka pengelolaan sampah di dua kota tersebut tidak berjalan efektif. Sementara Surabaya yang tidak memiliki perda yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah (pada saat penelitian Meidiana dan Gamse tersebut dilakukan) tetapi menggunakan regulasi tentang lingkungan hidup sebagai kerangka legal dalam pengelolaan sampah (Meidiana and Gamse, 2011: 23).

Dari evaluasi kondisi pengelolaan sampah di tiga kota tersebut, Meidiana dan Gamse (2011) mencatat beberapa hal berkaitan dengan rendahnya efektivitas pengelolaan sampah.

1. Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah kota dengan operator tempat pembuangan akhir tentang konsep pembuangan akhir yang sehat dan terkendali beserta kriterianya sehingga menyebabkan pengoperasian tempat pembuangan akhir menjadi tidak layak.
2. Pengelolaan sampah di tiga kota tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah setempat dengan kontribusi anggaran dari provinsi, tanpa adanya partisipasi dari sektor swasta maupun



kontribusi anggaran dari pusat. Retribusi sampah menjadi sumber pendapatan tetapi tidak bisa menutupi semua biaya yang diperlukan, sehingga terjadi defisit anggaran pengelolaan sampah yang menyebabkan standar pengelolaan yang rendah.

3. Minimnya infrastruktur dan peralatan yang diperlukan akibat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah.
4. Kurangnya sistem informasi, kecuali di Yogyakarta, terutama berkaitan dengan pencatatan aktivitas pengelolaan sampah, seperti jumlah trip, kedatangan truk, dan jumlah sampah yang dikumpulkan. Pencatatan volume sampah yang tidak teratur menyebabkan sulitnya melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap aspek-aspek penting pengelolaan sampah.
5. Keberadaan pemulung yang tidak diatur dengan baik. Di satu sisi, mereka berperan mengurangi sebagian jenis sampah yang bisa didaur ulang, tetapi di sisi lain aktivitas mereka membahayakan karena mereka dengan bebas bisa keluar dan masuk kawasan penampungan sampah tanpa ada pembatasan.
6. Tidak adanya rencana pengelolaan pembuangan akhir sesuai Pasal 44 UU Pengelolaan Sampah, kecuali Yogyakarta (Meidiana dan Gamse, 2011).

Beberapa contoh pengelolaan sampah di berbagai kota tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya tergantung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saja. Tetapi metode yang digunakan dan partisipasi publik masyarakat turut berperan dalam mengurangi produksi sampah. Kasus di Banglades, Taiwan dan Melbourne menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bisa dilakukan mulai sejak dari hulu. Partisipasi publik dari sisi hulu adalah pengurangan volume sampah yang dimulai dari sektor rumah tangga. Sedangkan pada sisi hilir, keberadaan para pengumpul sampah berperan mengurangi jumlah sampah terutama sampah daur ulang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *desk research*. *Desk research* adalah strategi penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data eksisting atau data yang telah ada (Thiel, 2014 : 102). Data utama yang menjadi bahan adalah dokumen kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda yang saat ini masih berlaku, yaitu Perda Kota Samarinda No. 2/2011. Selain itu, data sekunder lain digunakan untuk memperkaya informasi yaitu hasil-hasil penelitian dan laporan statistik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan WPR yaitu problematisasi kebijakan dengan beberapa tahapan. Pertama, mendeskripsikan isi dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi muatan yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengidentifikasi “problem” yang termuat dalam dokumen kebijakan dan asumsi yang mendasarinya dengan panduan pertanyaan-pertanyaan dalam pendekatan WPR. Dan ketiga, mengidentifikasi isu penting yang tertinggal atau belum termuat dalam dokumen kebijakan tetapi memiliki relevansi dengan isu utama kebijakan tersebut.

D. KERANGKA TEORI

Setiap kebijakan pada dasarnya dibuat memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu “permasalahan”. Pendekatan WPR untuk menganalisis kebijakan, menurut Bacchi (2009: 25), menekankan pada tiga proposisi kunci yang berkaitan dengan problematisasi kebijakan, yaitu:

“(1) *We are governed through problematisations*; (2) *We need to study problematisations rather than ‘problem’*; dan (3) *We need to problematise (interrogate) the problematisations on offer through scrutinizing the premises and effects of the problem representations they contain.*”



Pendekatan WPR dimulai dengan mencari permasalahan yang digunakan sebagai dasar sebuah kebijakan dan sebagai apa permasalahan ditampilkan (Bacchi, 2009, p. 3). Bacchi (2009; 2012; 2015) sering menggunakan tanda petik untuk menyebut istilah “*problem*” dan “*problematisations*”. Karena dalam pendekatan WPR, permasalahan (*problem*) tidak selalu dikonotasikan sebagai sebuah kasus atau hal yang selalu negatif, dan istilah “*problematisations*” tidak berarti mencari kesalahan dalam kebijakan. Tetapi istilah permasalahan tersebut mengacu kepada hal atau isu yang ingin diselesaikan oleh suatu kebijakan. Sedangkan “*problematisations*” merupakan cara mengkonseptualisasikan isu dalam suatu kebijakan (Bacchi, 2015). Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan dalam mencari padanan kata yang tepat dalam Bahasa Indonesia maka istilah problematisasi digunakan dalam artikel ini sebagai pengganti istilah asli *problematisations*.

Teori genealogi dari Michel Foucault (1926-1984) diadopsi dalam pendekatan WPR untuk menjelaskan problematisasi kebijakan dalam dua cara. Pertama, problematisasi digunakan untuk mendeskripsikan metode analisis yang disebutnya berpikir secara problematik (*thinking problematically*) yaitu metode analisis yang menguji bagaimana suatu isu dipertanyakan, dianalisa, diklasifikasikan dan diatur pada waktu dan kondisi tertentu. Kedua, problematisasi mencakup proses sejarah bagaimana dan mengapa isu menjadi suatu masalah (Bacchi, 2009: 30; 2012). Dengan demikian, pendekatan WPR untuk menganalisa problematisasi suatu kebijakan merupakan proses analisa kritis terhadap suatu isu, bukan sekedar deskriptif (Bacchi, 2009: 39) dan proses historis karena berangkat dari kebijakan atau rancangan kebijakan yang sudah ada bergerak ke belakang mengkritisi bagaimana problematisasi kebijakan muncul.

Untuk mengoperasionalkan pendekatan WPR, Bacchi (2009) menawarkan enam poin pertanyaan sebagai panduan untuk menganalisa kebijakan. Pertama, “*What is the problem represented to be?*” Pertanyaan ini merupakan inti dari pendekatan tersebut, yaitu mencari isu yang ditampilkan sebagai permasalahan yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan atau rancangan kebijakan. Karena setiap kebijakan pada dasarnya dimaksudkan untuk merespon atau menangani suatu isu atau permasalahan. Oleh karena itu, pertanyaan ini diajukan pada urutan pertama yang perlu dijawab dalam pendekatan WPR.

Kedua, “*What presuppositions or assumptions underlie this presentation of the ‘problem’?*” Setelah representasi permasalahan ditemukan pada pertanyaan pertama, maka pertanyaan kedua ini mencari asumsi yang mendasari penampilan isu atau masalah yang ditampilkan tersebut. Bacchi (2009: 5) menganjurkan bahwa untuk mencari asumsi pemunculan masalah tersebut, peneliti atau analis kebijakan agar tidak tergantung dan tidak boleh percaya begitu saja kepada asumsi yang dibuat oleh penyusun kebijakan. Tujuan pertanyaan kedua ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa pola pikir konseptual (*conceptual logic*) yang mendukung representasi permasalahan (Bacchi, 2009: 5). Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk menemukan asumsi permasalahan, yaitu dengan cara menggali pola biner (*binaries*), konsep kunci (*keyconcepts*) dan kategori (*categories*) yang terdapat dalam kebijakan. (Bacchi, 2009: 7-9).

Ketiga, “*How has this representation of the ‘problem’ come about?*” Pertanyaan ini menggali proses sejarah terjadinya representasi permasalahan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pendekatan WPR mengadopsi konsep genealogi dari Foucault, maka pertanyaan ketiga ini menelusuri problematisasi berangkat dari kebijakan atau rancangan kebijakan yang sudah ada dan mengkritisi proses ke belakang bagaimana representasi permasalahan bisa muncul (Bacchi, 2009: 10).

Keempat, “*What is left unproblematic or silences in this problem representation? Where are the silences? Can the ‘problem’ be thought about differently?*” Pertanyaan ini mencari isu-isu relevan apa yang masih tertinggal dan belum termuat dalam problematisasi kebijakan (Bacchi,



2009: 12). Oleh karena itu, pemikiran yang kritis dari peneliti atau analis kebijakan diperlukan untuk menggali secara teliti dan jeli kemungkinan adanya isu-isu lain yang masih relevan dengan kebijakan tersebut.

Kelima, “*What effects are produced by this representation of the ‘problem’?*” Pertanyaan ini berkaitan dengan dampak yang dihasilkan dari representasi permasalahan kebijakan. Dampak dalam konteks pendekatan WPR ini lebih halus pengaruhnya dan mengandalkan pemahaman dengan menggunakan perspektif teoritis (Bacchi, 2009: 15). Untuk menjawab pertanyaan ini, tiga jenis dampak sudah cukup memadai digunakan sebagai pendekatan untuk menggali dampak problematisasi, yaitu *discursive effects*, *subjectification effects*, dan *lived effects*.

Dan pertanyaan keenam, “*How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated and defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?*” Pertanyaan ini dibangun dari pertanyaan ketiga. Analisa pada tahap ini menekankan pada cara bagaimana representasi permasalahan mencapai target audiens dan memperoleh legitimasi (Bacchi, 2009: 19).

Beberapa penulis telah menerapkan pendekatan WPR untuk menganalisa berbagai kebijakan dalam bidang yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah pertama Murray dan Powel (2009) menganalisa konstruksi diskursif kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam dokumen kebijakan di Australia. Mereka berpendapat bahwa penamaan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik dilakukan secara tidak konsisten antara kekerasan terhadap anak dan terhadap anggota keluarga yang lain.

Kedua, Payne (2014) membahas skema kesetaraan gender dalam kebijakan sektor kesehatan di Inggris dengan menggunakan analisa kritis terhadap dokumen kebijakan. Payne dalam studinya hanya mengaplikasikan tiga dari enam pertanyaan untuk menganalisis kasus tersebut, yaitu representasi masalah kebijakan (pertanyaan 1), asumsi yang mendasari representasi tersebut (pertanyaan 2), dan permasalahan yang tertinggal atau tersembunyi (pertanyaan 4). Menurut Bacchi (2009: 19), dalam menggunakan pendekatan WPR peneliti perlu mempertimbangkan sendiri kebutuhannya.

Ketiga, Barsoum (2015) yang menganalisis kebijakan ketenagakerjaan untuk kaum muda di Mesir. Studi ini menguraikan asumsi implisit (pertanyaan 2) dalam pendekatan kebijakan tersebut. Dan selanjutnya Bacchi (2015) juga menggunakan pendekatan WPR untuk menganalisis problematisasi dalam kebijakan alkohol berdasarkan dokumen laporan WHO. Dengan demikian, pendekatan WPR bisa digunakan untuk menganalisa berbagai isu kebijakan di berbagai bidang. Dan urgensi peneliti atau analis kebijakan dalam melakukan kajian mengenai aspek apa yang ingin ditemukan jawabannya akan berpengaruh terhadap pemilihan pertanyaan yang akan diterapkan.

Artikel ini menggunakan empat pertanyaan pertama untuk melakukan analisis terhadap penampikan permasalahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Berdasarkan pertanyaan tersebut, kajian ini mencari permasalahan yang ditampilkan dalam kebijakan, asumsi yang mendasarinya dan bagaimana mendapatkannya. Selanjutnya, ditelusuri persoalan yang tertinggal yang belum termuat dalam kebijakan. Data dalam studi ini merupakan data sekunder baik dokumen resmi dari instansi pemerintah seperti dokumen kebijakan dan data statistik, didukung dengan literatur akademik, seperti artikel jurnal. Selain itu, berbagai informasi tambahan seperti laporan media yang relevan dengan topik kajian digunakan untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, Perda No. 2/2011 yang terdiri



atas 11 Bab dan 50 Pasal, menyebutkan secara eksplisit tujuan kebijakan tersebut pada Pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk mewujudkan tujuan itu, penyelenggaraan pengelolaan sampah menjadi perhatian dalam kebijakan ini. Dimulai dengan perencanaan pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 7) yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan juga dilakukan oleh pemerintah kota (Pasal 8), mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (Pasal 9). Peran pemerintah kota sangat dominan dalam tahap pelaksanaan sedangkan peran masyarakat tidak disebutkan secara jelas. Pada Pasal 10 hanya disebutkan bahwa dalam pemilahan sampah, pemerintah kota menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pada sisi pengurangan sampah, peran masyarakat dan pelaku usaha mulai terlihat yaitu dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang atau mudah didaur ulang (Pasal 18). Namun, pada tahap penanganan sampah (Pasal 19) sebagai kelanjutan Pasal 9 yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, proses kegiatan dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Peran masyarakat pada tahap pengumpulan adalah memindahkan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS).

Tugas dan wewenang pemerintah kota disebutkan pada Pasal 22 hingga Pasal 24, walaupun pada pasal-pasal sebelumnya sudah disebutkan berbagai tugas pemerintah kota. Demikian juga tentang kewajiban dan larangan yang diatur pada Pasal 25 hingga Pasal 41, dimana Pasal 25 mengatur kewajiban pemerintah kota. Sedangkan Pasal 26 hingga Pasal 41 mengatur kewajiban dan larangan bagi masyarakat dan dunia usaha. Sebagai konsekuensinya, ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif diatur pada Pasal 47 – Pasal 48.

Representasi Masalah

Tahap pertama pendekatan WPR adalah mengidentifikasi representasi masalah yang ditampilkan baik secara implisit maupun eksplisit dalam dokumen kebijakan, yaitu permasalahan atau isu yang ditampilkan dan dipecahkan melalui kebijakan yang bersangkutan (Bacchi, 2009: 2). Berdasarkan pasal-pasal dalam Perda No. 2/2011 teridentifikasi bahwa kebijakan ini menampilkan persoalan sampah dalam dua permasalahan, yaitu sampah sebagai persoalan pengelolaan atau manajemen dan sampah sebagai persoalan kepatuhan publik. Ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan pertama pendekatan WPR.

1. Sampah sebagai permasalahan pengelolaan (*Waste is represented as management problem*).

Persoalan sampah direpresentasikan sebagai persoalan pengelolaan ketika kebijakan ini mengorganisasikan proses perencanaan dan implementasi penanganan sampah sebagaimana diatur pada Pasal 6 hingga Pasal 21. Proses ini mencakup aktivitas pemisahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah mulai dari rumah tangga hingga tempat penampungan. Kebijakan ini menyebutkan cara mengurangi sampah, waktu masyarakat harus membuang sampah di tempat penampungan sementara, dan lokasidi mana masyarakat harus menempatkan sampah. Untuk memfasilitasi aktivitas tersebut, pemerintah kota menyediakan tempat penampungan di berbagai titik, truk angkutan sampah sebagai sarana pengangkutan yang dioperasikan oleh petugas yang disediakan oleh pemerintah kota, dan juga petugas kebersihan di jalan.



2. Sampah sebagai permasalahan kepatuhan (*Waste is represented as obedience problem*).

Persoalan sampah direpresetasikan sebagai persoalan kepatuhanketika kebijakan ini mengatur kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat beserta sanksi bagi pihak yang melanggar. Bagi mereka yang melanggar peraturan pengelolaan sampah maka kepada mereka akan dikenakan sanksi denda atau sanksi administratif. Pasal 47 menyebutkan bahwa barang siapa melanggar larangan (pada pasal 38, 39, dan 40) akan dihukum dengan kurungan tiga bulan penjara atau denda hingga Rp 50 juta. Kemudian pasal 48 menyebutkan barang siapa yang membuang sampah tidak di tempat yang telah disediakan maka akan dikenakan sanksi tiga bulan penjara atau denda hingga Rp 50 juta.

Asumsi Representasi Masalah (*Presuppositions or Assumptions of the 'Problem' Representations*)

Berdasarkan Pasal 3 Perda No. 2/2011, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan dan juga menciptakan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan ini sejak persoalan sampah menjadi isu publik karena persoalan sampah mempengaruhi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Lebih dari itu, sampah yang bertebaran di kawasan permukiman dan jalanan menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan menjadi sumber penyakit. Karena alasan itu, maka pemerintah kota berkewajiban mengelola sampah untuk melindungi kesehatan warganya. Menurut Bacchi (2009: 7-9), tiga pilihan metode bisa digunakan untuk menganalisa asumsi representasi masalah, yaitu *binaries*, *key concepts*, and *categories*. Dalam konteks perda pengelolaan sampah ini bisa digunakan dua metode untuk menganalisa isu yang relevan, yaitu *key concept* and *binaries*.

1. Konsep Kunci: Manajemen

Manajemen atau pengelolaan menjadi konsep kunci ketika kebijakan ini menyusun beberapa aktivitas yang meliputi perencanaan penanganan sampah dan kemudian melaksanakannya. Dalam fase perencanaan, berdasarkan Pasal 7, pemerintah kota akan menyusun target pengurangan volume sampah, memberikan fasilitas dan pendanaan, mengembangkan kemitraan, dan juga menggunakan teknologi pemrosesan sampah. Kemudian di fase pelaksanaan, pemerintah kota akan melaksanakan pengurangan, pemrosesan dan penggunaan ulang sampah (*reuse*). Lebih dari itu, pemerintah kota juga melakukan monitoring dan pengawasan pemanfaatan material di perusahaan-perusahaan. Pemerintah kota juga memfasilitasi warga dan sektor swasta untuk mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang sampah.

Pemerintah kota melaksanakan serangkaian aktivitas melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan didanai melalui anggaran daerah. Pekerjaan ini dilakukan karena pemerintah kota perlu merespon kebutuhan warganya tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai persoalan manajemen, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Dinas dalam mengumpulkan sampah setiap tahun karena Dinas tersebut menambah jumlah truk angkutannya selama beberapa tahun kecuali 2011. Dengan demikian, kebijakan tersebut secara jelas menganggap bahwa penerapan manajemen pengelolaan sampah baik sebagaimana yang diuraikan dalam dokumen tersebut diharapkan bisa mengatasi persoalan sampah di Samarinda.

2. Binaries: Kepatuhan versus Ketidapatuhan

Analisa binaries menggunakan dikotomi dua hal yang berbeda untuk menganalisa isu dalam dokumen kebijakan, misalnya publik/private, nasional/internasional, pria/wanita, legal/illegal, dan



sebagainya (Bacchi, 2009: 7). Permasalahan sampah menjadi perhatian publik sehingga semua warga perlu memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut maka kepatuhan masyarakat terhadap Perda pengelolaan sampah ini ditampilkan menjadi isu yang penting. Konsekuensi bagi masyarakat yang tidak patuh adalah mendapat sanksi sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Perda. Oleh karena itu, dalam kebijakan ini dimuat serangkaian sanksi terhadap siapapun yang melanggar larangan atau tidak patuh terhadap aturan tertulis yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan ini.

Jika warga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan larangan maka hal ini akan mendukung upaya pemerintah kota untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan sehat. Sebaliknya jika warga tidak patuh terhadap aturan dalam kebijakan tersebut maka akan sulit mewujudkan kota yang bersih dan sehat sehingga mereka perlu diberikan sanksi. Sanksi tersebut merupakan pendekatan paksaan karena tidak semua warga memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga lingkungan mereka. Oleh karena itu, dilihat dari metode binaries dalam pendekatan WPR, aspek kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah di kota ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan tersebut.

Proses Penampilan Masalah

Berdasarkan data peningkatan volume sampah dan jumlah penduduk, diperoleh informasi bahwa peningkatan volume sampah paralel dengan kenaikan jumlah penduduk di kota tersebut. Karena pengelolaan sampah yang kurang baik dan kepatuhan masyarakat yang rendah maka menimbulkan kondisi lingkungan yang semakin tidak sehat. Lebih dari itu, sebagian warga di kota ini tinggal di pinggir sungai dan mereka sering membuang sampah di sungai. Hal ini akan semakin buruk jika pemerintah kota tidak memberikan fasilitas publik yang memadai dan menciptakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Perda No. 2/2011 merupakan produk hukum tertinggi di daerah yang dibuat secara bersama-sama antara Pemerintah Kota dan DPRD. Perda ini ditetapkan oleh Walikota pada 24 Januari 2011 untuk menggantikan Perda sebelumnya yaitu Perda No. 5/1987. Sampah, menurut kebijakan ini, meliputi sampah rumah tangga dan sampah yang menyerupai sampah rumah tangga seperti dari kawasan industri dan perdagangan, fasilitas sosial, dan fasilitas publik lain. Berdasarkan kebijakan ini, pemerintah kota membuat perencanaan dan mengeksekusi pengelolaan sampah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Dengan terbitnya kebijakan yang baru ini maka kebijakan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang harus ditangani pada saat ini sehingga perlu dibuat yang lebih baru. Kurangnya kepedulian sebagian warga tentang kesehatan lingkungan, seperti membuang sampah tidak di tempat sampah, juga menjadi pendorong untuk membuat aturan yang lebih tegas. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu melakukan perbaikan terhadap pengelolaan sampah dan menerapkan sistem sanksi terhadap warga yang tidak patuh.

Kebijakan ini memberikan mandat kepada Walikota untuk menyusun peraturan walikota. Namun, hanya satu Peraturan Walikota yang diterbitkan yaitu Peraturan Walikota No. 16/2012 tentang Implementasi Pengelolaan Sampah. Sayangnya, Peraturan Walikota ini nampak hanya mengkopi sebagian isi Perda dan tidak menurunkan perda ke dalam petunjuk yang lebih teknis dan operasional.

Isu atau Masalah yang Tertinggal

Representasi masalah yang ditampilkan dalam Perda No. 2/2011 tidak mencakup semua



permasalahan yang ada untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih. Kebiasaan sebagian masyarakat yang membuang sampah di sungai dan jalanan terbukti telah memberikan kontribusi menimbulkan lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Di Samarinda, Sudiran (2005) menyatakan bahwa kebiasaan buruk warga mendorong mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini menyebabkan sampah berserakan di jalanan, sungai, dan kawasan permukiman. Lebih dari itu, warga pada umumnya tidak memasukkan sampah ke dalam kantong plastik yang berakibat sampah berserakan di sekitar tempat penampungan sampah. Chen *et al* (1997) menyatakan bahwa pendidikan publik diperlukan untuk mengurangi produksi sampah dari rumah tangga.

Peter (2005 : 356) menyatakan bahwa permasalahan karakteristik populasi merupakan salah satu persoalan kebijakan yang lebih relevan terhadap agenda setting. Namun, kebijakan ini tidak mempertimbangkan karakteristik kebiasaan warga sebagai suatu permasalahan dalam penyusunan kebijakan. Akibatnya, permasalahan ini menjadi hal yang tertinggal dan tidak terpecahkan karena kebijakan ini lebih memprioritaskan sisi pengelolaan sampah dan sanksi. Oleh karena itu, edukasi publik juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota ini (pertanyaan # 4 pendekatan WPR).

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah di kota Samarinda lebih menekankan pada pendekatan *top-down* melalui serangkaian proses dan sanksi yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan. Sementara keberadaan sebuah kebijakan yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah tidak menjamin terlaksananya pengelolaan sampah secara efektif apabila implementasinya tidak berjalan dengan baik. Contoh di kota Malang dan Yogyakarta yang telah memiliki Perda pengelolaan sampah ternyata masih menyisakan persoalan dalam pengelolaan sampahnya (Meidiana dan Gamse, 2011). Demikian juga di kota Samarinda yang telah memiliki Perda pengelolaan sampah sejak 1987 dan sudah beberapa kali diperbarui, ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan sampah. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah sampah yang tidak terangkut.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Samarinda lebih menekankan kepada aspek manajemen dan sanksi terhadap masyarakat sebagai isu utama. Dua isu tersebut ditampilkan sebagai representasi masalah kebijakan yang ingin diselesaikan melalui Perda tersebut dengan asumsi bahwa menyelesaikan kedua isu tersebut bisa menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya menjangkau permasalahan yang ada. Satu hal yang dilupakan adalah pendidikan terhadap masyarakat yang kurang mendukung upaya penciptaan lingkungan sehat. Penanganan sampah didominasi oleh pemerintah kota, sedangkan peran masyarakat dalam pengurangan produksi sampah tidak banyak diatur dalam kebijakan ini. Pendidikan publik seharusnya juga menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut sebagai upaya melibatkan partisipasi masyarakat (*bottom-up*) untuk mendukung pengurangan volume sampah, bukan hanya pendekatan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Bahkan, pendekatan sanksi pun terbukti tidak efektif dilaksanakan di lapangan.

Dengan demikian, kebijakan ini memiliki kelemahan baik dari sisi penentuan representasi masalah maupun pada sisi implementasi. Pertama, dalam penentuan masalah yang akan dipecahkan masih ada persoalan yang tertinggal atau tidak dijangkau oleh kebijakan ini sehingga mempengaruhi efektivitas kebijakan, yaitu persoalan kebiasaan warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kedua, dalam implementasi kebijakan, pemerintah kota tidak benar-benar menerapkan sanksi



terhadap warga yang melanggar larangan. Dan ketiga, tiga amanat yang tertuang dalam dokumen kebijakan untuk menyusun Peraturan Walikota tidak sepenuhnya dilaksanakan sehingga aparat dan petugas di lapangan hanya bekerja seperti biasa tidak memiliki panduan yang lengkap.

Artikel ini memiliki keterbatasan yaitu lebih menekankan pada sisi dokumen kebijakan yang sudah ada. Oleh karena itu, perlu juga melihat persoalan pengelolaan sampah dari persepsi publik sehingga diperoleh gambaran permasalahan yang lebih luas untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah secara lebih komprehensif. Dengan studi persepsi publik bisa diperoleh gambaran mengenai harapan dan pendapat masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta bagaimana keterlibatan masyarakat bisa diwujudkan untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat.

Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan dalam kajian ini. Pertama, pemerintah kota perlu melakukan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Dalam pendidikan publik, pemahaman tentang perlunya pengurangan volume sampah sejak dari rumah tangga menjadi isu penting untuk disosialisasikan. Ini merupakan upaya dari sisi hulu karena sebagian besar produksi sampah berasal dari rumah tangga. Selain itu, edukasi publik juga diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Kedua, perlu dilakukan penguatan dari sisi implementasi kebijakan yaitu meliputi peningkatan kapasitas pengangkutan sampah dan pengawasan terhadap pembuangan sampah. Kapasitas pengangkutan sampah hendaknya sesuai dengan jumlah produksi sampah harian. Oleh karena itu, pemenuhan jumlah dan kapasitas armada pengangkut sampah menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan. Selain itu, pengawasan terhadap perilaku ketidakpatuhan masyarakat juga menjadi isu penting. Pengawasan tidak hanya oleh pemerintah kota, tetapi juga diperlukan peran masyarakat dalam mengontrol pengelolaan sampah. Hal ini berkaitan dengan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan masing-masing.

Dan ketiga, perbaikan dari sisi hilir, yaitu pengolahan sampah di kawasan tempat pembuangan akhir dengan metode yang ramah lingkungan. Pengelolaan sampah bukan hanya selesai dengan mengangkut sampah dari lingkungan rumah tangga ke tempat pembuangan akhir, tetapi lebih dari itu adalah mengolah sampah yang sudah tertampung tersebut dengan cara yang ramah lingkungan.

Implikasi Kebijakan

Beberapa implikasi berpotensi muncul sebagai konsekuensi dari rekomendasi tersebut. Pertama, rekomendasi pertama memiliki implikasi terhadap dokumen kebijakan yang sudah ada karena perlu dilakukan revisi atas kebijakan pengelolaan sampah tersebut dengan memasukkan unsur pendidikan publik secara eksplisit sebagai sebuah isu penting dalam pengelolaan sampah. Atau menyusun peraturan walikota yang mengatur tentang edukasi publik berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Kedua, rekomendasi kedua dan ketiga tentang peningkatan kapasitas angkutan dan pengolahan sampah di sisi hilir berimplikasi terhadap belanja pemerintah kota. Peningkatan kapasitas angkutan berkaitan dengan pengadaan armada angkutan sampah dan tenaga operasional pengangkutan sampah. Sedangkan pengolahan sampah di sisi hilir berkaitan dengan penggunaan teknologi atau cara yang lebih efektif dan ramah lingkungan.



Penelitian Lanjutan

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa keterbatasan artikel ini adalah hanya melihat problem pengelolaan sampah dari sisi dokumen kebijakan karena menggunakan metode *desk research*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk melihat persepsi publik terhadap pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Dengan melihat persepsi publik akan diperoleh informasi sejauh mana harapan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Assoc. Prof. Gerry Redmond yang telah memberikan komentar terhadap versi awal naskah ini. Naskah ini dikembangkan dari tugas mata kuliah *Contemporary Cases in Public Policy* di program Master of Public Administration (Policy), School of Social and Policy Studies, Flinders University, South Australia dengan judul awal: “*Does Waste Management Policy in Samarinda Address the Problem?*”

DAFTAR PUSTAKA

- Bacchi, C. (2009). *Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?*, Frenchs Forest-NSW: Pearson Australia
- Bacchi, C. (2012). Why Study Problematizations? Making Politics Visible, *Open Journal of Politics Science*, 2 (1), pp. 1-8, <http://dx.doi.org/10.4236/ojps.2012.21001>
- Bacchi, C. (2015). Problematizations in Alcohol Policy: WHO's "Alcohol Problems", *Contemporary Drug Problems*, 42 (2), pp. 130-147, DOI: 10.1177/0091450915576116
- Barsoum, G. (2015). "Job Opportunities for the Youth": Competing and Overlapping Discourses on Youth Unemployment and Work Informality in Egypt, *Current Sociology*, pp. 1-17, DOI: 10.1177/0011392115593614
- Benington, J. (2011). From Private Choice to Public Value?, dalam Benington, J. and Moore, M.H. (eds), *Public Value: Theory and Practice*, Hampshire: Palgrave Macmillan
- BPS. (2010). *Samarinda dalam Angka 2010*, Samarinda: BPS Kota Samarinda
- BPS. (2014). *Samarinda dalam Angka 2014*, Samarinda: BPS Kota Samarinda
- BPS. (2015). *Samarinda dalam Angka 2015*, Samarinda: BPS Kota Samarinda
- Chen, H.T., Wang, J.C.S., and Lin, L.H. (1997). Evaluating the Process and Outcome of a Garbage Reduction Program in Taiwan, *Evaluation Review*, 21 (1), pp. 27-42, DOI: 10.1177/0193841X9702100102
- Coveney, J. (2010). Analyzing Public Health Policy: Three Approaches, *Health Promotion Practice*, 11 (4), hal. 515-521, DOI: 10.1177/1524839908318831
- Kaltimpost*, 23 April 2013, online <<http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/18224/tiap-hari-300-ton-sampah-tak-terangkut.html>> direview tanggal 15 Agustus 2014
- Kota Samarinda, nd, *Visi dan Misi*, online <<http://www.samarindakota.go.id/content/visi-dan-misi>> direview tanggal 10 September 2014



- Meidiana, C. dan Gamse, T. (2011). The New Waste Law: Challenging Opportunity for Future Landfill Operation in Indonesia, *Waste Management and Research*, 29 (1), hal. 20-29, DOI: 10.1177/0734242X10384013
- Moore, M.H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*, Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press
- Murray, S. dan Powell, A. (2009). "What is the Problem?" Australian Public Policy Construction of Domestic and Family Violence, *Violence Against Women*, 15 (5), Hal. 532-552, DOI: 10.1177/1077801209331408
- Pariatamby, A. and Fauziah, S.H., 2014, Sustainable 3R Practice in the Asia and Pacific Regions: The Challenges and Issues, in Pariatamby, A. and Tanaka, M. (eds), *Municipal Solid Waste Management in Asia and the Pacific Islands: Challenges and Strategic Solutions*, Springer, Singapore, pp. 15-40
- Payne, S. (2014). Constructing the Gendered Body? A Critical Discourse Analysis of Gender Equality Schemes in the Health Sector in England, *Current Sociology*, pp. 1-19, DOI: 10.1177/0011392114531968
- Peters, G.B. (2005). The Problem of Policy Problems, *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 7 (4), pp. 349-370, DOI: 10.1080/13876980500319204
- Pickin, J. (2008). Unit Pricing of Household Garbage in Melbourne: Improving Welfare, Reducing Garbage, or Neither?, *Waste Management & Research*, 26, pp. 508-514, DOI: 10.1177/0734242X08094950
- Sudiran, F.L. (2005). Instrumen Sosial Masyarakat Karangmumus Kota Samarinda dalam Penanganan Sampah Domestik, *Makara, Sosial Humaniora*, 9 (1), pp. 16-26.
- Thiel, S.V. (2014). *Research in Public Administration and Public Management: An Introduction*, New York: Routledge
- Yousuf, T.B. (2014). 3R (Reduce, Reuse and Recycle) in Bangladesh, in Pariatamby, A. and Tanaka, M. (eds), *Municipal Solid Waste Management in Asia and the Pacific Islands: Challenges and Strategic Solutions*, Springer, Singapore, pp. 61-75

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Samarinda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda